

The Management and Role of Melati Dewa Village-Owned Enterprises on the Improvement of the Community's Economy in Wolonwalu Village, Bola Sub-District, Sikka Regency

Pengelolaan dan Peran BUMDes Melati Dewa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Wolonwalu Kecamatan Bola Kabupaten Sikka

Kristiana Reinildis Aek¹, Yustina Olivia da Silva^{2*}, Maria Sylvana Mariabel Carcia³, Vinsensius Ama Muda⁴, Octrofianus Nong Onci⁵

Universitas Nusa Nipa^{1,2,3,4,5}

yustinaoliviadasilva@gmail.com¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The village is the smallest unit of a country whose proximity is carried out in real terms by directly touching, feeling and having sensitivity to the needs of the people who need to prosper. The type of research used in this study is qualitative research, namely research that focuses on the management and role of BUMDes. In this study, information was collected using interviews and questionnaires. The role of the Melati Dewa Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Wolonwalu Village is already running, such as running a savings and loan business unit, running rental services, providing photocopies and ATK, BRILink and water tank cars. Of all the BUMDes business units, BUMDes' performance has not been maximized in improving the village economy. The role of BUMDes in business development and creating broad employment opportunities for the community and increasing the village's original income is not as expected. The role of BUMDes is still far from the initial goal of establishing BUMDes because it has not yet been present as a forum and facilitator in developing the community's economy based on the utilization of the superior potential that exists in Wolonwalu Village.

Keywords: BUMDes, Economy, Society

ABSTRAK

Desa merupakan sebuah unit terkecil dari suatu negara yang kedekatannya dilakukan secara riil dengan langsung menyentuh, merasakan dan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu untuk disejahterakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pada pengelolaan dan peran BUMDes. Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan kuesioner/angket. Peran Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Melati Dewa di Desa Wolonwalu sudah berjalan, seperti menjalankan unit usaha simpan pinjam, menjalankan jasa sewa pake, menyediakan foto copy dan ATK, BRILink dan Mobil tangki air. Dari keseluruhan unit usaha BUMDes tersebut, kinerja BUMDes belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian desa. Peran BUMDes dalam pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Peran BUMDes masih jauh dari tujuan awal pembentukan BUMDes karena belum hadir sebagai Wadah dan fasilitator dalam pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan pemanfaatan potensi unggulan yang ada di Desa Wolonwalu.

Kata kunci: BUMDes, Ekonomi, Masyarakat

1. Pendahuluan

Dinamika kehidupan pedesaan yang ada di Indonesia telah mengundang banyak perhatian dan simpati dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya seperti lembaga pendidikan,

perusahaan hingga lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Untuk memperkuat prinsip pembangunan pedesaan, maka dilakukan berbagai macam model dan nilai-nilai dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Menurut Nugroho (2015) pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan meliputi segala bidang yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa merupakan sebuah unit terkecil dari suatu negara yang kedekatannya dilakukan secara riil dengan langsung menyentuh, merasakan dan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu untuk disejahterakan. Kedekatan kesejahteraan akan kemajuan di bidang ekonomi tidak hanya menjadi prioritas wilayah perkotaan melainkan secara merata harus sampai ke wilayah pedesaan. Dalam proses pemerataan itu dibutuhkan kesamaan visi dalam pengembangan kemandirian, penghargaan, kesejahteraan, dan penghormatan akan nilai-nilai luhur kemanusiaan, kearifan lokal serta budaya masyarakat desa setempat baik dalam hal kerja sama, gotong royong maupun keswadayaan yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dalam proses pemerataan desa mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan pengarahannya, pengelolaan akan pengembangan maupun bantuan modal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah menawarkan modal sesuai kondisi desa sehingga mampu mengatasi masalahnya yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Sayangnya, kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa berbanding terbalik dengan kenyataan akan keadaan serta kondisi sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat desa. Kondisi ini tergambar jelas pada modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*). Ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat *parokial* atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi lokal. (Wiratata, 2020:2).

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Melalui BUMDes diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan (Jaryono dan Tohir, 2019:24). Badan usaha milik desa ini dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal serta pengelolaannya dilaksanakan oleh kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.

Kehadiran BUMDes sangat diharapkan mampu membantu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan sepenuhnya memanfaatkan serta mengelola aset ekonomi yang ada di desa. BUMDes adalah instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan usaha ekonomi, BUMDes juga bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan kepemimpinan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada. BUMDes juga dapat memperkuat peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran, sekaligus menjadi penggerak perekonomian di desa. BUMDes juga dapat ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di desa dengan potensi desa yang berkembang berdasarkan budaya di desa tersebut (Dewi, 2021:4).

Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak mengambil bagian dalam mendirikan BUMDes di Kabupaten Sikka. Keterlibatan ini

terlihat dari 147 desa yang ada di Kabupaten Sikka hampir semua telah mempunyai BUMDes baik yang sudah beroperasi, dalam tahap perkembangan maupun dalam tahap sosialisasi dan survei. Meskipun pendirian BUMDes di Kabupaten Sikka dinilai belum sesuai dengan mekanisme dan regulasi pembentukan.

BUMDes berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Tahapan pembentukan BUMDes yang terjadi di Kabupaten Sikka selama ini adalah melakukan sosialisasi sekaligus pembentukan badan pengurus dan selanjutnya langsung melakukan penyertaan modal BUMDes. Desa Wolonwalu merupakan salah satu desa ada di Kecamatan Bola Kabupaten Sikka yang telah mendirikan dan menjalankan program BUMDes. Pendirian BUMDes Desa Wolonwalu termasuk dalam perencanaan pembangunan dari atas. Dimana BUMDes didirikan atas intruksi dari pemerintah Kabupaten Sikka dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wolonwalu. Faktanya, terdapat beberapa kendala diantaranya pemerintahan yang masih mendominasi dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Keberadaan BUMDes di Desa Wolonwalu ini seharusnya dapat menggerakkan kegiatan ekonomi serta memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdayaguna tetapi kurang begitu tepat dalam pengelolaannya. BUMDes di Desa Wolonwalu Kecamatan Bola Kabupaten Sikka bernama "Melati Dewa" memiliki unit usaha Simpan pinjam, unit usaha foto copy dan ATK, unit usaha BRILink, unit usaha sewa pake dan unit usaha mobil tangki air yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wolonwalu. Peningkatan ekonomi rakyat menurut Mubyarto dapat dilihat dari tiga segi, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu, dan mengembangkan ekonomi rakyat yang mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah (Hikmawati, (2016:3). Dalam peningkatan ini maka BUMDes berperan penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan lingkungan kehidupan yang baik dalam mengelola potensi unggulan masyarakat, memanfaatkan sebaik-baiknya potensi alam yang ada di Desa Wolonwalu, apalagi rata-rata penduduk masyarakat desa Wolonwalu yang bermata pencaharian sebagai petani.

Dalam perjalanan BUMDes Melati Dewa dinilai kurang berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa unit usaha BUMDes yang sampai saat ini tidak memberikan efek yang optimal baik bagi masyarakat maupun bagi pendapatan anggaran dana Desa Wolonwalu. Ada unit usaha yang mulai macet dalam melayani kebutuhan masyarakat Desa Wolonwalu terutama dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengelolaan unit usaha BUMDes Melati Dewa mulai dari unit usaha Simpan Pinjam, unit usaha foto copy dan ATK yang belum berjalan sesuai harapan awal pembentukan BUMdes. Pengelolaan unit usaha ini dinilai tidak optimal karena kurangnya sosialisasi serta kurangnya peran aktif pengurus BUMdes dalam melihat potensi unggulan yang ada di Desa Wolonwalu baik dari potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

Berdasarkan observasi penulis, pengelolaan unit usaha foto copy dan ATK BUMdes Melati Dewa diketahui tidak berjalan atau macet karena kurangnya aktivitas masyarakat desa dalam hal pengurusan administrasi maupun lokasi yang jauh dari wilayah perkantoran maupun sekolah. Selain itu, unit usaha ini dinilai memicu bahkan mematikan usaha masyarakat di desa wolonwalu. Unit usaha Simpan Pinjam sampai saat ini juga hasilnya tidak optimal karena kurangnya sosialisasi mengenai keunggulan menjadi anggota aktif koperasi. Selain itu, macetnya unit usaha ini karena kalah bersaing dengan koperasi-koperasi simpan pinjam yang ada di sekitar desa Wolonwalu sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjadi anggota aktif.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengelolaan dan peran BUMDes. Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan kuesioner/angket. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mendefinisikan metode *kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. *Deskriptif* merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya (Mubarak, *et al.*, 2021:49).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2012: 244).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2014: 246) meliputi:

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagaimacam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yangmana yang dianggap yang menjadi pusat penelitian dilapangan.

Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sudah disederhanakan.

Pengambilan Keputusan Atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi yang terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan BUMDes Melati Dewa di Desa Wolonwalu

Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Seperti kerjasama yang dilakukan antara BUMDes Lestari, Pemerintah Desa Karangsono dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari awal pendirian hingga proses kegiatan selalu tidak lepas dari pembinaan dan pengawasan serta melakukan evaluasi dalam kinerja BUMDes ((Filya, 2017:22). Dari penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa koordinasi yang dilakukan

antara berbagai komponen BUMDes Guyub Reksa Dana milik Desa Sukorejo sudah berjalan dengan baik (Filya, 2017:29). Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh pengawas BUMDes Melati Dewa Bapak Teklanus Niko yang menyatakan sebagai berikut : “Melibatkan. Melibatkan terutama yang mewakili masyarakat biasanya mengikutsertakan anggota BPD bersama perwakilan masyarakat lainnya dalam hal membuat program kerja dan menentukan anggaran rumah tangga, anggaran dasarnya bersama dengan masyarakat dalam hal ini anggota BPD”.

Lebih lanjut, hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Laurentius selaku Ketua BUMDes adalah sebagai berikut: “Kalau BUMDes ini model kerja samanya kalau kita sebenarnya bagaimana melihat kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi BUMDes ini terbentuk pertama karena aturan eee. Artinya bahwa ketika dengan munculnya dana desa ini diwajibkan bahwa setiap desa itu harus ada BUMDes. Akhirnya di tahun 2017 itu dilakukan sosialisasi dan beberapa sekaligus sosialisasi akhirnya terbentuklah BUMDes ini. Sehingga waktu sosialisasi kita lewat kegiatan waktu itu, pertemuan waktu terakhir kita menyepakati terbentuklah BUMDes yang dinamakan BUMDes Melati Dewa. Jadi, ketika melihat kebutuhan masyarakat waktu itu akhirnya BUMDes ini memutuskan ada beberapa kegiatan yang dilakukan”

Beliau menambahkan bahwa: “Jadi kegiatan itu yang pertama bahwa sebelum dengan munculnya BUMDes ada yang namanya Anggur Merah, ketika dalam perjalanan sampai mungkin dua tahun dana anggur merah ini tidak tahu dari mana datangnya, tetapi waktu itu dijelaskan bahwa programnya datang dari Gubernur, almarhum Bapak Lebu Raya, ketika tidak menjabat lagi program anggur merah ini sudah tidak jalan tapi ketika waktu itu masih ada dana yang ada di masyarakat itu kurang lebih 250-an juta. Sehingga untuk melanjutkan program itu dana ini dihibahkan ke masyarakat, bisa dihibahkan ke desa tetapi harus ada badan dan ketika itu munculah sudah dengan yang waktu itu namanya dana desa saehingga paslah sudah ketika harus ada lembaga yang untuk mengurus kelanjutan daripada dana anggur merah itu sendiri dibentuklah sudah ini BUMDes sesuai dengan aturan yang ada.

Beliau menambahkan bahwa: “Jadi pertama unit usaha yang kami jalankan yaitu melalui simpan pinjam terus ketika kita melihat kebutuhan masyarakat ini ada beberapa kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetapi di desa ini belum ada. Sehingga kita lihat itu yang pertama kita melakukan kegiatan usaha jasa antara lain awal dana di 2017 itu kita mendapatkan dana dukungan untuk pemupukan modal dari dana desa itu sendiri tuju puluh lima juta, jadi itu kita gunakan yang pertama untuk tenda jadi, BRILink sama perlengkapan sewa baik perlengkapan dapur, kursi, lampu dan tenda itu sendiri. Itu awal di tahun 2017 dana awal. Jadi model kerja samanya kita melihat ini bukan model kerja sama tapi model bagaimana kita untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri” (Wawancara, 02 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara dengan penasehat BUMDes Melati Dewa dan Ketua BUMDes Melati Dewa dipaparkan bahwa kerja sama antara BUMDes dengan masyarakat desa Wolonwalu sudah terjalin dengan baik, beda halnya yang diungkapkan oleh Ibu Albina selaku Penjabat Kepala Desa Wolonwalu menyatakan bahwa: “Dalam tahap awal proses Pengelolaan BUMDes ini, penentuan kepengurusan organisasi dan penentuan setiap kegiatan unit usaha yang ada sekarang memang dilakukan melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan Pengurus Desa, anggota BPD serta beberapa anggota masyarakat dalam mengambil keputusan, namun kerja sama ini belum terlihat karena sampai saat ini BUMDes belum melakukan kerja sama dengan beberapa unit usaha kecil masyarakat disini seperti usaha CVO atau minyak kelapa murni yang belum ada pemberian modal maupun sebagai wadah pemasaran dari produk yang dihasilkan sehingga unit UKM yang ada disini harus mencari solusi sendiri demi keberlangsungan usahanya” (wawancara, 06 Juni 2022)

Lebih lanjut, Ibu Arnolda selaku masyarakat menyatakan bahwa: “Saya selaku anggota unit usaha simpan pinjam BUMDes melati Dewa dengan hadirnya BUMDes cukup membantu karena diberikan modal usaha, namun sampai saat ini belum terjalin kerja sama yang baik terutama dalam memberikan dukungan serta tindak lanjut dari modal usaha yang diberikan,

soal pemanfaatan produk usaha yang saya hasilkan, sehingga sampai saat ini kontribusi yang diberikan hanya sebatas pemberian modal". Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes melati Dewa dalam menerapkan prinsip *kooperatif* belum berjalan maksimal karena belum adanya kerja sama yang baik dengan masyarakat terutama dalam merangkul unit usaha kecil dan memberikan dukungan lebih lanjut soal pemanfaatan hasil produksimasyarakat desa Wolonwalu.

Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Seperti pemerintah Desa yang harus berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi kebutuhan BUMDes dalam tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa (Filya, 2017:22). Dari lima indikator Dukungan dan kontribusi dari berbagai komponen terhadap BUMDes dapat diambil simpulan bahwa semua komponen yang ada sudah menunjukkan adanya dukungan dan kontribusi kepada BUMDes. Meskipun dalam komponen masyarakat dukungan dan kontribusinya kurang dalam hal ikut membantu mengelola namun mereka melakukannya dengan cara lain yaitu dengan menggunakan jasa usahanya. (Filya, 2017:30-31). Hal iniselaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Teklanus Niko bahwa Dalam pelayanan yang utama yang kita lihat itu misalnya dana bergulir dengan bunga yang rendah tadi, terutama dilayani kepada masyarakat yang punya usaha kecil seperti buka kios habis jalan pasar. Itu yang diutamakan jadi masyarakat yang kalau mau menggunakan dana BUMDes dia harus punya usaha kecil dulu, dia rencana mau buat apa sehingga dalam bentuk penambahan modal. Dan selama ini berjalan sedangkan pinjaman uang yang sifatnya konsumtif kita sebagai pengawas melarang keras hal itu"

Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDes harus mau memberikan informasi tentang BUMDes dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum (Filya, 2017:22). Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, Kepala Desa Majasari dan Direktur BUMDes Majasari memiliki perencanaan yang matang dan telah dipertimbangkan untuk BUMDes ke depannya. Perencanaan yang di buat dapat dikatakan sudah baik karena perencanaan ini disosialisasikan kepada masyarakat dan pengurus BUMDes mampu menampung aspirasi dari masyarakat yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat (Munarwoh, 2019:76).

Berdasarkan penjelasan dari dua indikator prinsip transparan maka penulis mengambil simpulan bahwa BUMDes Guyub Reksa Dana sudah melaksanakan prinsip pengelolaan transparan dengan baik (Filya, 2017:31).

Penelitian terdahulu diatas sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Teklanus Niko bahwa: "Dengan adanya badan ini kan mau menopangi masyarakat dengan penambahan modal supaya dia harus melakukan usaha untukmeningkatkan ekonominya. Dan lebih lanjut hal ini awalnya sudah dilakukan sosialisasi kepada setiap kampung, semua masyarakat yang adatentang penggunaan dana dan pendirian BUMDes"(wawancara, 30 Mei 2022).

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Ketua BUMDes bahwa: "Akhirnya di tahun 2017 itu dilakukan sosialisasi dan beberapa sekaligus sosialisasi akhirnya terbentuklah BUMDes ini. Sehingga waktu sosialisasi kita lewat kegiatan waktu itu, pertemuan waktu terakhir kita menyepakati terbentuklah BUMDes yang dinamakan BUMDes Melati Dewa"(wawancara, 02 Juni 2022).

Keterbukaan informasi tentang pengelola BUMDes ini telah penulis rasakan sendiri, hal ini ditunjukkan dengan saat dilakukan beberapa kali wawancara dan observasi turun ke lapangan semua pertanyaan yang diajukan dijawab santai dan terbuka. Selain itu ketika dihubungi via telepon ataupun sms dan WA para pengelola BUMDes bersedia untuk menerima segala pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan peran BUMDes Melati Dewa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Wolonwalu.

Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDes (Filya, 2017:22).

BUMDes Guyub Reksa Dana telah memiliki Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes meskipun tidak lengkap. Yang seharusnya ada 4 item laporan hanya 2 yang dibuat oleh pengelola BUMDes. Menurut prinsip pengelolaan akuntabel idealnya Laporan Pertanggungjawaban BUMDes berisikan: a. Laporan Kinerja Pengelola b. Kinerja Usaha c. Laporan Keuangan d. Rencana Pengembangan Usaha Namun pada kenyataannya BUMDes Guyub Reksa Dana hanya membuat Laporan Keuangan dan Rencana Pengembangan Usaha saja. Meskipun begitu Laporan Keuangan yang dibuat sudah cukup baik dengan dibuat setiap bulan dan dilengkapi dengan neraca di setiap tahunnya (Filya, 2017:32).

Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. BUMDes di Kecamatan Bojonegoro memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten melalui kecamatan yang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa melihat latar belakang perseorangan dari komponen tersebut (Filya, 2017:29). Persamaan perlakuan/pelayanan yang diberikan kepada setiap pelanggan BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes Guyub Reksa Dana telah menerapkan prinsip pengelolaan emansipatif (Filya, 2017:32). Penelitian terdahulu ini selaras dengan yang dikatakan oleh Pengawas BUMDes Melati Dewa Bapak Teklanus Niko bahwa :
"Diwajibkan untuk semua. Terutama masyarakat wolonwalu harus berupaya memanfaatkan untuk mendapatkan dana itu"(wawancara, 30Mei 2022).

Berdasarkan paparan data diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMDes Melati Dewa telah menerapkan prinsip pengelolaan *emansipatif*.

Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes (Filya, 2017:22).

Kegiatan usaha BUMDes Lestari harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Seperti upaya BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha yaitu dengan membentuk tiap-tiap unit usaha. Kegiatan unit usaha tersebut harus dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang sehingga dapat tetap lestari dalam mencapai tujuan awal yaitu meningkatkan perekonomian Desa (Fauzi, 2019:108).

Penelitian ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Laurentius Lodan Nong Lehan selaku Ketua BUMDes Melati Dewa bahwa :

“Ini saya harus gambarkan agak sedikit meluas bahwa kita di Kecamatan Bola ini ada enam desa dan semua desa diwajibkan harus dibentuklah yang namanya BUMDes. Tapi syukurlah bahwa dari enam desa ini bahwa yang artinya baru ada satu desa yang sudah ada bukti BUMDes”(wawancara. 02 Juni 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil wawancara dan observasi peneliti dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMDes melati Dewa sudah menerapkan prinsip sustainable karena semenjak berdiri awal sampai sekarang BUMDes melati Dewa tetap bertahan dan terus berkembang dalam setiap unit usaha yang ada.

Peran BUMDes Melati Dewa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Wolonwalu

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comercial institution*). Selain itu BUMDES berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam pengelolaan pelayanan masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (Hidete, *et al.*, 2022:45-46).

Meningkatkan Peranan Masyarakat

Peran masyarakat dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah (Sakdiyah, 2018:31). Dengan adanya usaha Simpan pinjam pada BUMDes Genta Persada ini telah membantu masyarakat untuk mengem-bangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peminjaman modal di BUMDes Genta Persada ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha (Pradnyani, 2019:45). Hasil penelitian terdahulu ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Laurentius selaku ketua BUMDes Melati Dewa mengatakan bahwa: “Jadi awal, saya lanjutkan dari hibah tadi ada unit usaha simpan pinjam. Jadi dalam perjalanan itu, kita mencairkan dana dua ratus juta untuk sepuluh peminjam pertama itu dua ratus juta, dua puluh jutanya kita ke BRILink. Jadi uang yang sebenarnya awal dari anggur merah itu totalnya yang kita terima hanya riil itu dua ratus tiga puluh, dua puluh jutannya masih beredar di masyarakat itu yang belum dikembalikan oleh masyarakat sampai sekarang. Dana itu bergulir, selama ini tetap kita gulirkan Cuma kemarin yang saya sampaikan munculnya ASF itu yang banyak peminjam itu kan usaha ternak babi. Dalam perjalanan ketika penyakit itu muncul, guliran dana ini agak tersendat. Jadi itu kita maklumi semua karena wabah. Jadi kita minta untuk usaha lagi untuk pelihara lagi babi sehingga kita usaha untuk kembalikan lagi uang itu. Jadi untuk sementara memang dia agak tersendat di unit usaha yang ada. Modal itu tetap diberikan dan sekarang sementara ada di masyarakat dia tidak boleh ada dalam kos. Istilahnya kas kosong”(wawancara, 02 Juni 2022)

Hal yang sama diungkapkan Oleh Sekretaris BUMDes Melati Dewa, Bapak Evaritus bahwa : “selama ini pemberian modal yang kita layani itu memang orang yang punya komitmen. Contoh dari simpan pinjam itu usaha kelapa murni yang sampai sekarang tetap produksi, kemudian yang dulu itu tenak babi sampai ada yang punya enam induk dari usaha modal yang kita berikan itu. Usaha babi itu banyak hanya karena penyakit kemarin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita belum bisa mendampingi”(Wawancara, 31 Mei 2022).

Hasil penelitian terdahulu selaras juga yang diungkapkan oleh Ibu Magdalena Arnolda selaku masyarakat Desa Wolonwalu bahwa :

“ada modal. Modal itu juga bukan dari kalau dana desa itu regulasinya tidak bisa untuk simpan

pinjam hanya penyertaan, tetapi itu dari dana anggur merah yang menjadi kesepakatan masyarakat dihibahkan ke BUMDes untuk kelola menjadi unit simpan pinjam. Sebelum dihibahkan ke BUMDes dana anggur merah ini dihandle oleh desa dan menjadisimpan pinjam masyarakat melalui kelompok. Ini berlaku untuk semua masyarakat tapi dengan prosedur persyaratan BUMDes”(Wawancara, 31 Mei 2022).

Membuka Lapangan Pekerjaan

Sumodiningrat (1997) dalam Yanuardi (2004:19) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki dan memberdayakan masyarakat serta penanggulangan pengangguran. Peran bumdes dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa dan dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat yang ada di desa sehingga tidak lagi ada orang-orang desa yang ke kota dalam hal mencari pekerjaan cukup tinggal di desa mengembangkan potensi desanya sehingga terjadi perputaran ekonomi yang signifikan di desa.

Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan (Agunggunanto, *et al.*, (2016:69). Namun hal ini tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di BUMDes Melati Dewa seperti yang diungkapkan oleh Bapak Teklanus Niko selaku Pengawas BUMDes Melati Dewa bahwa :

“ Yah. Jadi yah untuk beberapa pengelola misalnya di usaha pelayanan jasa dalam hal peralatan ada tenaga sendiri. Misalnya tenda kalau masyarakat pake harus pake tenaga untuk pasang dan bongkar. Itu tenaga, tenaga lepas sih diluar dari karyawan BUMDes, sedangkan karyawan yang ada disana kita ada tiga orang, empat dengan ketua itu kita melalui tes ada wawancaranya”(Wawancara, 30 Mei 2022).

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris BUMDes Bapak Evaristus Kodo bahwa : “Kita rekrut ulang. Jadi mereka itu kayak yang sekarang kita jalnin itu, kita SDM di tempat itu ada empat orang. Mau penambahan dilihat dari keuangan memang tidak mampu untuk membiayai mereka. Hanya sekarang kita jalan itu ketua, sekretaris, bendahara sama kepala unit usaha. Tetapi dalam pelaksanaan kayak ketua dia membawahi unit tangki air, saya sekretaris ini jasa penyewaan, tenda jadi dan semuanya, kemudian yang bendahara dia kepala unit usaha simpan pinjam, sedangkan yang kepala unit usaha dia yang kepala untuk usaha BRILink. Jadi memang kita ambil kebijakan seperti itu yang pertama karena keterbatasan SDM yang kedua sebenarnya untuk transparansi keuangan, soal pertanggungjawaban keuangan jadi tetap melapor ke kepala unit usaha baru ke bendahara. Untuk penyerapan tenaga kerja kita memang belum bisa, kalau untuk di tangki air itu kita memang pake persentasi jadiselama ini ada dua orang sekarang sudah tiga dan itu untuk mengelolah unit tangkinya itu tapi mereka sistim persen, kontrak dan penghasilan dan pendapatan juga presentasi”(Wawancara, 31 Mei 2022).

Hal yang sama diungkapkan oleh masyarakat Desa wolonwalu Ibu Magdalena Arnolda bahwa: “Baru tahun kemarin yang perekrutan kembali sekretaris ini selebihnya belum”(wawancara, 31 Mei 2022).

Berdasarkan kajian teori dan keterangan-keterangan BUMDes Melati Dewa belum memberikan peran yang baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan dalam hal mengurangi pengangguran karena masih sebatas perekrutan tenaga kerja untuk pengurus sekaligus pengelola BUMDes. Selain itu perannya belum maksimal karena munculnya rangkap jabatan dan sisahnya masih sebatas tenaga lepas.

Mengembangkan Potensi Desa

BUMDes didirikan oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan seluruh potensi

ekonomi, kelembagaan ekonomi, dan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. BUMDes juga menjalankan fungsi jasa, perdagangan dan pembangunan ekonomi lainnya terutama dalam meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan (Agunggunanto, *et al.*, 2016:69).

Setelah sumber daya manusia mengalami peningkatan, pemberdayaan masyarakat harus ditekankan sebagai prioritas dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah melakukan motivasi dan support kepada masyarakat untuk bisa mandiri dan berdaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Masyarakat dapat dikatakan berdaya jika memaksimalkan berbagai potensi yang ada di masyarakat, baik potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya struktural. Akumulasi dari semua potensi tersebut dapat menciptakan masyarakat yang berdaya. Keberdayaan masyarakat secara otomatis akan mempengaruhi tingkat ekonomi dan kesejahteraannya (Chikmawati, 2019:112).

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa BUMDes Teja Kusuma sudah menjalankan peran sebagai pengembangan potensi masyarakat yang menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, contohnya memberikan kredit dengan bunga yang murah kepada pedagang di pasar anyar Tejakula (Darwita, *et al.*, 2018:57).

Pemberdayaan potensi desa tidak akan berkembang jika sumber daya manusia dan pemberdayaan tidak dilakukan. Pemberdayaan potensi desa sebagai bahan baku dalam meningkatkan ekonomi perdesaan. Potensi alam harus digali dan dioptimalkan oleh masyarakat desa. Potensi desa yang diidentifikasi secara baik, kemudian dikelola menjadi sesuatu yang lebih berkualitas serta dilakukan oleh sumber daya manusia yang handal, dapat dipastikan pembangunan desa secara berkelanjutan akan dengan sendirinya terbangun. Kesejahteraan dapat dicapai (Chikmawati, 2019:112).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa diarahkan pada kelembagaan agribisnis, hanya saja BUMDes belum terlalu mengarah pada kelembagaan agribisnis sehingga belum bisa menggali potensi lokal yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Teklanus Niko bahwa :

“ disini saya melihat BUMDes Melati Dewa belum. Saya mau katakan belumlah karena masyarakat membentuk kelompok untuk mengelolah, artinya mengelola sumber daya alam yang ada di Wolonwalu, melihat kalau misalnya hasil petani dekolompokan baru dia sebagai pemasar yah itu belum ada. Dalam rencana tahun-tahun berikut, dalam tahun 2022 ini belum juga, tetapi tahun 2021 itu saya mengangkat BUMDes, dengan hadirnya BUMDes dia melihat eee potensi desa. Potensi itu misalnya petani itu dia dalam membudidayakan apa saja, ada tanaman-tanaman perdagangan habis itu tanaman hortikultura itu sebenarnya dia harus, peternakan tapi sampai sekarang BUMDesnya belum mengambil suatu kegiatan itu”(Wawancara, 30 Mei 2022).

Hasil penelitian terdahulu tidak selaras dengan hasil yang diperoleh peneliti seperti yang diungkapkan oleh Ketua BUMDes Melati Dewa Bapak Laurentius yang mengatakan bahwa : “Baik. Jadi mungkin saya gambarkan dari awal menyangkut Sumber Daya Manusia ini, jadi ini artinya sangatlah sulit kita membentuk suatu lembaga. Ini saya harus gambarkan agak sedikit meluas bahwa kita di Kecamatan Bola ini ada enam desa dan semua desa diwajibkan harus dibentuklah yang namanya BUMDes. Tapi syukurlah bahwa dari enam desa ini bahwa yang artinya baru ada satu desa yang sudah ada bukti BUMDes. Kalau yang lain sudah tahun 2022 ini mungkin baru mau mulai dan itu betapa susahnyanya untuk awal kita sampai bentuk ini terbentur di Sumber Daya Manusia. Kita harus akui bahwa sebenarnya wolonwalu ini tidak

kekurangan Sumber Daya Manusianya, tamatan SMA bahkan sarjana masih banyak yang nganggur, cuma itulah karena kadang-kadang gengsi-gengsian tadi, ketika kita kerja tetapi penghasilan kita kadang kecil apa semua itu yang membuat banyak orang tidak mau bergabung di BUMDes ini. Jadi untuk personalia yang ada di BUMDes hanya pengurus saja terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan kepala unit usahajasa. Kalau Sumber Daya Alam dan kenapa sampai sekarang kita belum untuk melihat potensi desa yang ada, kalau di Wolonwalu ini sebenarnya banyak untuk potensi desa yang ada baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan itu ada dan di rencana kita sebenarnya itu sudah di tahun 2020 perencanaan kita bahwa, rencana kita itu nong kita ambil di peternakan dan lebih khusus di budidaya babi, tetapi karena tidak lama munculah penyakit ASF sehingga untuk sementara sampai sekarang belum kita jalankan. Jadi, sekarang ini kita hanya jalankan yang ada. Jadi baik itu di 2017 tadi dalam perkembangan di 2019 kita mendapat hibah mobil tangki air. Tangki air ini juga sudah berjalan kurang lebih satu tahun mau jalan dua tahun, sehingga usaha kita baru sekitar itu sajanong”(wawancara, 02 Juni 2022)

Hal yang sama diungkapkan oleh Penjabat Kepala Desa wolonwalu Ibu Albina mengatakan bahwa :

“kalau menyangkut potensi unggulan desa disini itu coklat dengan coklat itu mereka memanfaatkan oleh kelompok GAPOKTAN. Itu ada pengolahan untuk coklat itu, sudah berjalan tapi dalam perjalanan kelompoknya kurang giat lagi karena pengelolanya masih secara manual, mesinnya agak macet-macet, tidak bisa dioperasi. Dan waktu itu untuk yang coklat itu GAPOKTAN sudah ada lebih dulu, BUMDESnya kemudian. Waktu itu GAPOKTAN sudah dengan badan hukum jadi BUMDes masih dengan PERDES. Sehingga untuk potensi unggulan itu dikelola oleh GAPOKTAN semua bukan dari BUMDes”(wawancara, 06 Juni 2022).

Lebih lanjut hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Magdalena Arnolda selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Semua potensi yang, contoh potensi desa wolonwalu moke, tenun ikat dan lain-lain itu sudah diarahkan hanya mungkin dengan keterbatasan personil yang ada di BUMDes sehingga mereka belum apa namanya, belum terlaksana dengan baik, belum berjalan, sehingga Bergeraknya mereka masih sebatas simpan pinjam dan tangki air. Hanya itu, tetapi yang dimaksudkan moa mereka terhadap itu tuh, pemberdayaan ekonomi masyarakat tuh, itu yang mereka belum, padahal sudah disampaikan, belum melihat potensi yang ada untuk mereka bisa. Contoh kita disini dengan bubuk coklat, coba kalau mereka baca peluang ini, kenapa mereka tidak bisa promosikan keluar, sehingga ini dengan keterbatasan personil menghandle ini masih sangat minim”(wawancara, 31 Mei 2022).

Berdasarkan paparan data diatas peran BUMDes Melati Dewa tidak berjalan dengan baik sebagaimana dengan tujuan awal pembentukan BUMDes karena belum hadir dalam mewedahai dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada. BUMDes belum mampu merangkul potensi-potensi unggulan yang ada baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang ada di Desa Wolonwalu karena masih sebatas wacana dan rencana kerja yang belum ada realisasi nyata sampai saat ini. BUMDes Melati Dewa terbentuk hanya sebatas melihat kebutuhan masyarakat tanpa melihat potensi unggulan yang ada di desa. Banyak potensi dan sumber daya desa yang tidak teridentifikasi secara baik dan tidak terpetakan secara optimal.

Meningkatkan Pendapatan

Peranan BUMDes terhadap perekonomian masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha pertanian atau perkebunan melalui kegiatan simpan pinjam demikian juga dengan peningkatan pendapat kelompok subak hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aziz prasetyo (2016), dan Hibrahim (2019) yang mengatakan bahwa Keberadaan BUMdes secara ekonomi dapat meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Suwendra dan Sujana, 2020:401). Pendapatan masyarakat dalam pendekatan

Adisasmita (2006) terkait dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi perdesaan harus diikuti oleh pemerataan pendapatan di masyarakat (Chikmawati, 2019:108). Selain kepada masyarakat BUMDes Melati Dewa juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan bagi desa Wolonwalu. Dari keterangan- keterangan diatas BUMDes memberikan peran yang cukup baik, hanya sajaini belum maksimal seperti masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit simpan pinjam di BUMDes sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat saja, tidak hanya itu peran BUMDes dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Tibubeneng dirasa masih belum maksimal (Pradnyani, 2019:46).

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Ibu Albina Selaku Penjabat Kepala Desa Wolonwalu bahwa : “Kalau kita menghubungkan pendapatan dengan hadirnya BUMDes ini memang belum maksimal, karena masyarakat membutuhkan jasanya saja, kalau terkait dengan mengakomodir semua usaha masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru itu belum maksimal karena tidak mengarah pada potensi unggulan”(Wawancara, 06 Juni 2022). Ibu Albina menambahkan bahwa : “PADes kita 20% dari keuntungan. Dia menurun tiap tahun. Karena potensi foto copy itu mereka tidak manfaatkan secara maksimal, BRILink juga tidak maksimal. Untuk aktivitas jasa-jasa yang ada belum maksimal”(Wawancara, 06 Juni 2022).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Evaristus Kodo selaku sekretaris BUMDes bahwa : “untuk peningkatan pendapatan itu kayaknya hanya orang yang, nasabah yang diberikan modal itu ada. Untuk masyarakat yang lain sebagai warga yang bukan nasabah itu seperti yang tadi saya katakan secara tidak langsung ia. Contoh tangki air, jasa sewa, BRILink untuk manfaat langsung. Untuk desa kita bagi 50% dari hasil SHU itu untuk desa. Jadi setiap tahun untuk desa selalu ada”(wawancara, 31 Mei 2022).

Berdasarkan kajian penelitian-penelitian terdahulu dan paparan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes Melati Dewa dalam meningkatkan pendapatan belum maksimal karena masyarakat hanya menggunakan jasa yang ada di BUMDes. Peran BUMDes melati Dewa dalam meningkatkan pendapatan Desa belum juga maksimal karena belum mengalami peningkatan dalam hal kontribusi PADes setiap tahunnya melainkan terjadi penurunan

5. Penutup

Kesimpulan

Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Melati Dewa di Desa Wolonwalu belum maksimal dan kurang profesional dalam mengelolah unit usaha yang ada karena tidak mengedepankan prinsip *kooperatif* dalam mengelolah setiap unit usaha yang dibentuk dengan masyarakat Desa Wolonwalu. Peran Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Melati Dewa di Desa Wolonwalu sudah berjalan, seperti menjalankan unit usaha simpan pinjam, menjalankan jasa sewa pake, menyediakan foto copy dan ATK, BRILink dan Mobil tangki air. Dari keseluruhan unit usaha BUMDes tersebut, kinerja BUMDes belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian desa. Peran BUMDes dalam pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Peran BUMDes masih jauh dari tujuan awal pembentukan BUMDes karena belum hadir sebagai Wadah dan fasilitator dalam pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan pemanfaatan potensi unggulan yang ada di Desa Wolonwalu.

Saran

Pengurus BUMDes, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program BUMDes Melati Dewa yang telah dilaksanakan. Terutama dalam meningkatkan kerjasama dengan

masyarakat, merangkul dan mewadahi masyarakat dalam memanfaatkan potensi unggulan yang ada di Desa Wolonwalu serta memberikan makna dan arti terkait BUMDes Melati Dewa baik logo maupun sejarah sehingga banyak dipahami masyarakat tentang peran dan manfaat akan hadirannya BUMDes Melati Dewa.

Daftar Pustaka

- Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan badan usaha milik desa di Sumberanyar Pasuruan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 293- 299.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). *peranan badan usaha milik desa (bumdes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada Bumdes di Gunung Kidul*, Yogyakarta.
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Pemberdayaan kelompok agroindustri dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1).
- Bahtiar, B. (2021). Efektivitas badan usaha milik desa (bumdesa) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai . *Skripsi tidak diterbitkan*. Sinjai : Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah. Sinjai.
- Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. (2019). Analisis pengaruh bumdes dalam menopang kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 32-39.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101- 113.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus*, 9(1).
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Dewi Setyo Rini, W. (2021). Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan badan usaha milik desa (Bumdes) di Desa Gunung Mulia Kecamatan Puger Kabupaten. *Skripsi tidak diterbitkan*. Jember : Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Jember.
- Fajarwati, Y., Yusuf, M., & Handayani, R. (2016). Implementasi Program Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. *Skripsi tidak diterbitkan*. Serang : Fakultas ilmu sosoal dan ilmu politik. Univeritas Sultan Agung Tirtayasa. Serang.
- Fauzi, M. D. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengembangkan usaha an ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *Skripsi tidak diterbitkan*. Blitar : Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Filya, A. R. (2017). Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dallam meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *JE & KP (Jurnal Ekonomi dan keuangan Publik)*, 19-39
- Fitriani, K. (2020). Efektivitas pinjaman modal usaha bumdes meranti jaya kepada pelaku

- umkm (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Skripsi tidak diterbitkan*. Pekanbaru : Program Studi Ekonomi Syari'ah. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. Pekanbaru
- Hasmawati, F. (2018). *Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*. Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(1), 62-76.
- Hidete, Y., Tulusan, F., & Londa, V. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(117).
- Hikmawati, M. (2016). Analisis dampak strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam melalui program kampung ternak dompet dhuafa Jogja. *Skripsi tidak diterbitkan*. Yogyakarta : Program Studi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Jaryono, J., & Tohir, T. (2019). Analisis kinerja bumdes "Mitra Usaha Makmur" dalam pengaruhnya terhadap pendapatan asli desa (Pades) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Kamaroesid, Herry. (2016). *Tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan pendapatan asli desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*. TanjungPinang.
- Lestari, F. (2013). Pengaruh jiwa kewirausahaan dan kreativitas terhadap keberhasilan usaha pada sentra industri rajutan Binong Jati Bandung. Available at elib. unikom. ac. id, 8, 14-27.
- Malistiani, Y. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan pendapatan asli desa (Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal). Tugas akhir tidak diterbitkan. Tegal : Program Studi DIII Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Tegal.
- Mubarak, E., Singal, Z. H., & Gugule, H. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Korporasi PT. Arafura Surya Alam (ASA) di Desa Kotabuanan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Indonesian Journal of Social Science and Education*, 1(1), 48-53.
- Mubarok, R. (2020). Model pengelolaan praktik pengalaman lapangan pada masa pandemi. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 5(2), 147-160.
- Munarwoh. (2019). Analisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)
- Nugroho, M. R. (2018). Penerapan pola sinergitas antara bumdes dan umkm dalam menggerakkan potensi desa di Kecamatan Saptosari. *Prosiding Sembadha*, 1, 28-37.
- Pendirian, B. P., & Desa, P. B. U. M. (2007). *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)* Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019, October). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *In Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* 2(1).
- Prajitno, S. B. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif. Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.(tersedia di <http://komunikasi.uinsgd.ac.id>).
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Purnomo, (2004), Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Makalah*,

- Lombok Timur: BPMD
- Purwaningsih, E., & Ulfah, M. (2015). Study Kinerja Keuangan Perusahaan Berdasarkan Analisis Rasio Profitabilitas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(6).
- Puspayanthi, N. L. P. A. D., Wahyuni, M. A., & Prayudi, M. A. (2018). Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes untuk kemandirian desa pada desa di Kabupaten Jembrana. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ratmasari, D. I. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, penggunaan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Empiris pada BUMDES di Kabupaten Magelang). *Skripsi tidak diterbitkan*. Magelang : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang
- Rokhmat Subagiyo, S. E. (2017). Metode penelitian ekonomi islam: konsep dan penerapan.
- Sakdiyah, H. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). *Skripsi tidak diterbitkan*. Medan : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan
- Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai implementasi ekonomi kreatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
- Suaidah, Y. M., Purbowati, R., & Susilo, D. E. (2019). Laporan pendampingan pengabdian masyarakat: pendampingan pengelolaan dana desa (BUMDes, di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.CV. Alfabeta, Bandung.
- Suwendra, I. W., & Sujana, I. N. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Eka Giri Karya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wanagiri. *In Seminar Nasional Riset Inovatif* 2(1): 393- 402.
- Wiratala, D. (2020). Pengaruh pengelolaan dan peran bumdes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).
- Yanuardi.(2004). Dampak Badan Usaha Milik Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul,Yogyakarta
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).